

KUISIONER PENYELENGGARAAN PBG DAN SLF

Kabupaten Sijunjung

No.	PERTANYAAN	JAWABAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	OPD, Bidang dan seksi yg memproses pbg, dan slf (SIMBG)?	Dinas PUPR, Bidang Penataan Bangunan Gedung untuk Rekomendasi Teknis PBG, DPMPTSP Untuk PBG	
2	berapa lama SOP pengurusan PBG dan SLF?	4 s/d 28 hari, sejak berkas dinyatakan lengkap untuk PBG, 3 hari untuk SLF.	Sesuai SOP pada PP 16 Tahun 2021.
3	berapa rata2 waktu real pengurusan PBG dan SLF?	6 hari untuk PBG dan 2 hari untuk SLF.	Sejak berkas dinyatakan lengkap.
4	Apa kendala dimasyarakat pada saat pengurusan PBG dan SLF?	Biaya pembuatan gambar yang mahal,	karena harus menggunakan tenaga ahli yang bersertifikat
5	Apa kendala di penyelenggara PBG dan SLF?	Tidak ada, kecuali pada versi terbaru SIMBG 3.2 sampai saat survey belum bisa di akses.	
6	berapa banyak PBG dan SLF yang diterbitkan sejak 2021 (rician pertahun)	belum ada data	
7	Berapa banyak anggota TPA dan TPT di kabupaten Sijunjung	untuk TPA 5 orang dan untuk TPT 3 orang	
8	Apakah ada sosialisasi penyelenggara PBG terhadap masyarakat dan dalam bentuk apa?	ada, dalam bentuk sosialisasi kepada para walinagari di daerah kabupatern Sijunjung.	
9	Apakah ada penetapan berkala SHST oleh Kepala Daerah? Kalau belum apa sebabnya?	ada.	Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/333/KPTS-BPT-2023 Tentang Penetapan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar

No.	PERTANYAAN	JAWABAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Apakah bangunan gedung negara di daerah ini sudah mempunyai PBG dan SLF?	Sudah untuk BGN yang dibangun setelah terbitnya PP 16 Tahun 2021.	
11	Persentase BGN yang sudah mempunyai PBG dan SLF?	lebih kurang 5 % dari jumlah BGN yang ada	Belum tersedia data BGN yang berada di kabupaten Sijunjung.
12	Pada simbg ada proses penyelenggaraan pbg, slf, sbkbg, rtb, di antara item ini proses apa saja yg sudah di laksanakan bidang ini?	hanya untuk PBG dan SLF	
13	Kalau belum semua, apa penyebabnya?	karena menu selain PBG dan SLF belum di aktifkan pada SIMBG.	
14	Apakah ada dilakukan pengawasan berkala terhadap perizinan yg telah diterbitkan?	ada, dilakukan oleh penilik bangunan gedung	
15	Apakah ada sanksi untuk pemilik bangunan gedung untuk pembangunan yg dilakukan tidak sesuai PBG yg telah diterbitkan(luasan, desain, RTH, sanitasi, dll)? Apa bentuk	ada, dalam bentuk peringatan dan pemohon diminta untuk mengurus kembali PBG perubahan sesuai dengan pembangunan yang dilakukan.	kasus jarang terjadi, dan pemohon cukup kooperatif.
16	dalam penyelenggaraan pbg dan slf apakah sudah mengacu sepenuhnya pada pp 16 tahun 2021	Penyelenggaraan PBG dan SLF sudah sepenuhnya sesuai PP 16 tahun 2021.	seluruh proses sudah melalui portal SIMBG.
17	Sudah adakah perda retribusi terkait pbg dan slf?	sudah ada.	
18	Adakah aturan2 tambahan yg diterbitkan oleh daerah terkait pbg dan slf?	tidak ada.	
19	Apakah sudah ada perda RDTR dan RTBL, klw belum prosesnya sudah sampai mana?	Untuk RDTR sudah ada RTDR kawasan untuk kecamatan Muaro Sijunjung, untuk kawasan lain seang dalam proses penyusunan. untuk RTBL belum ada.	
20	Apakah sudah ada pengelola teknis bersertifikat di daerah ini? Kalau sudah berapa jumlahnya?	ada pengelola teknis tapi tidak berdinis di Dinas PUPR.	